

## STRATEGI PENINGKATAN MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MATEMATIKA

Lilik Hidayat Pulungan<sup>1</sup>

Program Studi Pendidikan Matematika FKIP, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia<sup>1</sup>

Email: [lilikhidayat@umsu.ac.id](mailto:lilikhidayat@umsu.ac.id)

---

### Abstract

Process Standards are national education standards relating to the implementation of learning in educational units to achieve graduate competency, applicable to primary and secondary education levels in the formal school, both in the package system and in the semester credit system. Furthermore, through articles 19 to 22 concerning Educational Process Standards that the learning process in educational units is carried out interactively, inspiring, fun, challenging, motivating students to participate actively, and providing sufficient space for initiative, creativity and independence according to talents, interests and the physical and psychological development of students, the existence of exemplary educators, the existence of effective and efficient planning, implementation, and supervision in the assessment of the learning process

**Keywords:** Quality Strategy, Process Standards, Math Teacher

(\*) Corresponding Author: Nama, Alamat email, Nomor HP yang dapat dihubungi.

---

-spasi-

### PENDAHULUAN

-spasi-

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentuk pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Makna pendidikan dapat dilihat dalam pengertian secara luas, yakni pendidikan adalah memberikan bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Menurut Langeveld (2011) bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Secara sempit menurut Riva'i dan Murni (2019) pendidikan adalah proses secara sistematis untuk mengubah tingkah laku seseorang kearah yang lebih baik.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Kemudian bahwa fungsi pendidikan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Berdasarkan undang-undang tersebut bahwa dengan adanya pendidikan terciptanya sumber daya manusia yang unggul, cerdas dan bermartabat yang dapat mengisi dan membangun bangsa. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada tujuan itu.

Agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal, maka Pemerintah mengatur tentang standar proses pendidikan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2007 pasal 2 lingkup Standar Nasional Pendidikan diantaranya tentang Standar Proses, menjelaskan bahwa Standar proses berisikan tentang kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan, berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Selanjutnya, melalui pasal 19 sampai dengan 22 tentang Standar Proses Pendidikan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik, adanya keteladanan pendidik, adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran.

Syafarudin (2012: 18) menjelaskan manajemen pembelajaran adalah aplikasi prinsip, konsep dan teori manajemen dalam aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengorganisir pelaksanaan pembelajaran diperlukan pengelolaan pembelajaran dengan efektif. Pembelajaran yang dikelola dengan manajemen yang efektif diharapkan dapat mengembangkan potensi siswa, sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang mengakar pada individu siswa, karena paradigma metodologi pendidikan saat ini disadari atau tidak telah mengalami suatu pergeseran dari *behaviourisme* ke *konstruktivisme* yang menuntut guru dilapangan harus mempunyai syarat dan kompetensi untuk dapat melakukan suatu perubahan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Guru dituntut lebih kreatif, inovatif, tidak merasa sebagai *teacher center*, menempatkan siswa tidak hanya sebagai objek belajar tetapi juga sebagai subjek belajar dan pada akhirnya bermuara pada proses pembelajaran yang menyenangkan, bergembira, dan demokratis yang menghargai setiap pendapat sehingga pada akhirnya substansi pembelajaran benar-benar dihayati.

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Joice, Weil dan Calhoun (2009: 11) bahwa pendidik berperan aktif dalam membangun pembelajaran berdasarkan pandangan *constructivism*, yakni pembelajaran yang dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-konyong. Pembelajaran bukanlah seperangkat fakta konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pembelajaran itu dan membentuk makna melalui pengalaman nyata. Implementasi pendekatan konstruktivisme tersebut, dalam pembelajaran diwujudkan dalam bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student center*). Guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar sedemikian rupa, sehingga siswa bekerja sama secara gotong royong (*cooperative learning*).

Untuk menciptakan situasi yang diharapkan pada pernyataan di atas, menurut Slamet (2017: 92) seyogyanya seorang pendidik harus mempunyai syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajar dan membangun pembelajaran siswa agar efektif di kelas, saling bekerjasama dalam belajar sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan saling menghargai (demokratis), diantaranya : (1) guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu mengajar, variasi metode mengakibatkan penyajian bahan lebih menarik perhatian siswa, mudah diterima siswa, sehingga kelas menjadi hidup, metode pelajaran yang selalu sama (monoton) akan membosankan siswa, (2) menumbuhkan motivasi, hal ini sangat berperan pada kemajuan, perkembangan siswa. Selanjutnya melalui proses belajar, bila motivasi guru tepat dan mengenai sasaran akan meningkatkan

kegiatan belajar, dengan tujuan yang jelas maka siswa akan belajar lebih tekun, giat dari lebih bersemangat.

Dalam pandangan Zamroni (2007: 2) dikatakan bahwa peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan pendapat di atas, Brokes (2014: 4) menyatakan bahwa pembaharuan dalam bidang pendidikan harus dimulai dari “bagaimana anak belajar” dan “bagaimana guru mengajar”, bukan dari ketentuan-ketentuan hasil. Mutu pendidikan menekankan pada cara guru melaksanakan pembelajaran peserta didik aktif dan bermakna yaitu pembelajaran komunikatif dan pembelajaran yang berorientasi pada lingkungan.

Namun, disisi lain menurut Kasmadi (2013: 24) bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, guru masih memegang peran yang sangat dominan, guru banyak ceramah (*telling method*) dan kurang membantu pengembangan aktivitas murid. Kita yakin pada saat ini banyak guru yang telah melaksanakan teori *konstruktivisme* dalam pembelajaran di kelas tetapi volumenya masih terbatas, karena kenyataan dilapangan masih banyak kita jumpai guru dalam mengajar masih terkesan hanya melaksanakan kewajiban. Ia tidak memerlukan strategi, metode dalam mengajar, baginya yang penting bagaimana sebuah peristiwa pembelajaran dapat berlangsung.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sagala (2009: 24) mengatakan seorang guru dapat saja berhasil menguasai secara teoritik seluruh aspek material kompetensi yang diajarkannya dan dipersyaratkan, namun begitu dalam tindakan nyata saat menjalankan tugas atau pekerjaan, ternyata tidak sesuai dengan standar kualifikasi yang dipersyaratkannya, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai seorang yang kompeten atau tidak profesional. Rumusan kompetensi yang diharapkan bagi seorang guru harus mengandung tiga aspek, yakni (1) kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, apresiasi dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas; (2) ciri dan karakteristik kompetensi pada poin 1 digambarkan dengan tampil nyata; (3) hasil unjuk kerjanya itu harus memenuhi suatu Criteria standar kualifikasi tertentu.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, proses pendidikan seyogyanya dapat mengantarkan para peserta didik kepada cita-cita dan tujuan pendidikan itu sendiri, apa yang diharapkan harus sesuai dengan kenyataan (*das satu, das so Hen*). Namun berdasarkan data pelaksanaan PPG sertifikasi guru tahun 2018-2019, tercatat sebanyak 1107 peserta PPG yang berasal dari Kabupaten/Kota Medan berdasarkan analisis pada uji kompetensi dalam pelaksanaan Diklat PPG hasilnya rata-rata sebesar 41.94% guru tidak kompeten, seperti data pada tabel berikut :

Tabel 1 : Identifikasi Kelemahan Guru-Guru Dalam Diklat PPG Kota Medan Tahun 2018-2019

No	Kompetensi/Sub Kompetensi	Bidang Diklat		Jumlah
		Guru Kelas	Guru Mapel	
1	<b>Pengelolaan pembelajaran</b>			
	a. Perencanaan pembelajaran	11.40%	8.30%	19.70%
	b. Pelaksanaan pembelajaran	13.30%	11.70%	25.00%
	c. Penilaian hasil belajar	15.00%	7.30%	22.30%
	d. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian belajar	24.40%	16.20%	40.60%
	Rata-Rata (°/+)	16.03%	10.88%	26.90%
2	<b>Wawasan Kependidikan</b>			
	a. Memahami landasan kependidikan	23.60%	6.50%	30.10%
	b. Kebijakan pendidikan	21.20%	12.30%	33.50%
	c. Memahami tingkat perkembangan siswa	5.30%	4.70%	10.00%

d. Memahami pendek. pemb yang sesuai materi pemb.	33.50%	14.60%	48.10%
e. Menem kan kerjasama dalam pekerjaan	2.30%	2.50%	4.80%
f. Memanfaat kemajuan Iptek dalam pendidikan	42.60%	11.30%	53.90%
Rats-Rata( $\bullet Z\ll$ )	21.42%	8.65%	15.04%

Sumber : Unimed, 2019

Kelemahan-kelemahan guru-guru kelas (guru SD) dan guru bidang studi matematika pada saat asesmen tersebut, teridentifikasi pada saat dilakukan penilaian pada : (1) tes tertulis uji kompetensi dan, (2) pelaksanaan *Peer Teaching* dan (3) penilaian

Jika kita merujuk pada data tersebut, berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen PPG dari 1107 peserta diklat, maka sebanyak 465 orang peserta diklat tidak kompeten. Berdasarkan penilaian laporan Diklat, proses *Peer Teaching* rata-rata para peserta asesmen masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan. Penggunaan media pembelajaran sangat minim, rata-rata media dan alat peraga yang dibuat hanya sebatas media grafis yang digambar menggunakan kertas karton. Kemampuan guru dalam merancang rencana pembelajaran (RPP) masih lemah, kesalahan dalam RPP guru rata-rata pada ketidak konsistenan kompetensi dasar yang diajarkan dengan rancangan penilaian.

Berdasarkan keadaan tersebut, kondisi ini merupakan gambaran bahwa masih jauhnya harapan tentang guru yang berkualitas, jika kita merujuk pada PP No 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan diantaranya standar proses pembelajaran, meliputi 4 (empat) standar yakni : (1) standar perencanaan, (2) standar pelaksanaan pembelajaran, (3) standar penilaian, dan (4) standar pengawasan. Berdasarkan standar ini, idealnya seorang guru profesional harus mampu melaksanakan standar tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya dilapangan. Disamping kelemahan-kelemahan guru tersebut disebabkan oleh guru itu sendiri, secara teori faktor lain yang dapat menyebabkan lemahnya kinerja guru akibat tidak berfungsinya pengawasan standar proses tersebut, baik dari sekolah itu sendiri maupun oleh pengawasan pemerintah. Lemahnya pengawasan tersebut terjadi karena pengawas-pengawas sekolah yang diangkat tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai pengawas maupun calon pengawas, karena jabatan pengawas sekolah masih dipandang sebagai pengalihan tugas dari jabatan struktural pada Dinas Pendidikan baik Kota/Kabupaten, jabatan pengawas hanya peralihan bagi guru-guru atau kepala sekolah yang bermasalah, atau sebagai jabatan akhir sebelum masa pensiunan berakhir (Sagala, 2010). Kondisi ini tidak sesuai dengan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang standar pengawas dan calon pengawas

Sejalan dengan itu, sesuai dengan amanat UUSPN No. 20 tahun 2003 menegaskan dalam pasal 66 ayat (1) pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berdasarkan undang-undang tersebut sangat jelas bahwa pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan baik di pusat maupun di daerah harus melakukan proses pengawasan. Menurut Rivai dan Mumi (2019: 125) bahwa tujuan pengawasan dan supervisi pendidikan dan pengajaran, yaitu (1) pengawasan bermutu, (2) pengembangan profesional guru, (3) peningkatan motivasi guru. Sejalan dengan itu Rohani (2011) menjelaskan terdapat delapan fungsi pengawas, yakni (1) mengkoordinasi semua usaha sekolah, (2) melengkapi kepemimpinan sekolah, (3) memperluas pengalaman guru, (4) menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, (5) memfasilitasi penilaian yang terns-menerus, (6) menganalisis situasi belajar mengajar guru, (7) memberikan pengetahuan, keterampilan pada setiap staf atau guru, (8) membantu kemampuan mengajar guru.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, bahwa proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran harus dikelola secara baik, khususnya dalam proses pengawasan dan *Controllingl* oleh pihak-pihak yang berkepentingan yakni manajemen sekolah dan

pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam kajian ini, yakni strategi apakah yang dapat meningkatkan pencapaian mutu standar proses pembelajaran.

Untuk memudahkan penulis, secara teknis penulis dapat menggunakan template ini secara penuh. Penulis dapat menyesuaikan seluruh isi tulisan dengan template ini (ditimpa) bagian per bagian, sehingga secara keseluruhan diharapkan artikel yang dikirimkan sudah sesuai dengan panduan yang diharapkan. Sebaiknya menghapus sesuai kebutuhan, untuk menghindari kesalahan di bagian-bagian lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed,2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

## **PEMBAHASAN**

Agar standar proses pembelajaran tercapai secara maksimal diperlukan suatu strategi. Strategi yang berorientasi pada sistem pengelolaan dan proses pendidikan yang efektif. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terlebih dahulu pada latar belakang masalah di atas, maka strategi pemecahan masalah yang diusulkan dalam tulisan ini yakni :

1. Program pendidikan lanjutan bagi guru-guru yang belum kualifikasi sarjana. Tidak dapat dipungkiri bahwa guru-guru yang ada di daerah-daerah masih banyak yang belum berpendidikan Sarjana. Ini akan berpengaruh kepada standar proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan kesempatan kepada guru-guru PNS dengan mengalokasikan anggaran pembiayaan baik pusat maupun daerah, dengan pemberian bantuan atau beasiswa kepada guru-guru swasta. Adanya kesempatan pembiayaan kepada guru-guru untuk melanjutkan pendidikannya sampai pada standar kependidikan yang diharapkan, dengan pendidikan lanjutan tersebut diharapkan guru-guru akan memiliki kompetensi yang lebih baik, karena pendidikan berkorelasi dengan kemampuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai.
2. Program pengembangan profesional guru berkelanjutan. Pengembangan profesional guru berkelanjutan tersebut melalui MGMP yang berorientasi pada proses dalam artian harus mendapatkan penekanan yang penuh dengan pola kerja networking, yang harus dan perlu ditindaklanjuti dengan hubungan struktunl agar terjalin pola komunikasi horizontal yang lebih intensif.
3. Pengembangan kemampuan profesional guru melalui kegiatan in service secara sistematis yang meliputi program staffing dan training. Program staffing meliputi kegiatan selecting, assigning, evaluating, retiring, dan dismissing Sedangkan program training meliputi planning, implementing, evaluating dan sebagainya. Pengaitan antara pengadaan staff dengan dimaksudkan untuk memperbaiki pengajaran, sehingga dilakukan pemilihan, pengangkatan, penugasan atau penguasaan kembali dan berbagai jenis pelatihan lainnya. Agar program in-service tersebut dapat

memberikan manfaat maka harus dilakukan monitoring pasca pelaksanaan pelatihan secara terus-menerus dan dievaluasi, tentunya oleh pemangku jabatan pengawasan, selanjutnya pemberian program tersebut harus berdasarkan kebutuhan riil guru dilapangan.

4. Rekrutmen dan kualifikasi pengawas yang ketat. Pengawas-pengawas yang diangkat harus memiliki kualifikasi diantaranya : pendidikan S-2, memiliki pangkat minimal III c, berusia maksimal 50 tahun, pengalaman kerja pernah sebagai kepala sekolah dan telah memiliki sertifikat program pelatihan/pendidikan pengawas (supervisor). Dengan adanya kualifikasi yang ketat terhadap jabatan pengawas, diharapkan pengawas-pengawas tersebut dapat menjalankan tugasnya dan mengetahui fungsi serta tanggungjawabnya secara langsung dengan berbagai kecakapan yang telah dimilikinya.
5. Pemberdayaan pengawas dan guru untuk melakukan penelitian ilmiah. Sebagai pengawas dan pendidik yang memangku jabatan professional dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan prosedur ilmiah dalam menyelesaikan permasalahannya dilapangan, karena prosedur ilmiah merupakan cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah seperti Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) atau Kelas (PTK). Pemerintah harus memberdayakan pengawas dan guru dengan cara memberikan program hibah penelitian kepada mereka atau unsur-unsur sekolah dalam penelitian ilmiah. Program hibah penelitian PTK tidak hanya diprogramkan untuk kalangan perguruan tinggi (sedangkan guru/pengawas hanya dijadikan sebagai kolaborator semata) sementara itu permasalahan kelas kan hanya pengawas dan guru yang lebih mengetahui. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja pengawas dan guru pemerintah harus menstimulus mereka dengan berbagai program-program hibah kompetisi ilmiah..

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya keberhasilan pelaksanaan pendidikan di tentukan oleh tiga unsur utama, yakni pengawas, pimpinan sekolah, dan guru. Dimana fungsi pengawas adalah mengawasi dan memberikan bantuan atau bimbingan untuk memecahkan masalah pendidikan yang dihadapi pimpinan sekolah dan guru. Pimpinan sekolah memimpin guru serta murid dalam proses belajar mengajar dan membantu masalah guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Sedangkan guru adalah staf pengajar yang mendidik muridnya dan memecahkan permasalahannya. Agar standar proses pembelajaran di sekolah dapat tercapai secara maksimal tentunya harus melalui suatu proses kerjasama dalam artian saling memberikan bantuan atau yang sering disebut sebagai supervisi.

Selanjutnya agar standar proses dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak-pihak yang berkepentingan seperti sekolah, masyarakat, pemerintah, stakeholder maupun komite sekolah dalam bentuk perhatian pada proses pengawasan dan pembinaannya serta pemberian dukungan bagi berbagai program peningkatan profesional dan keilmuan bagi tenaga-tenaga kependidikan tersebut. Berdasarkan kajian dalam tulisan ini strategi peningkatan pada standar proses pembelajaran berupa program-program binaan dan pengembangan yang dirasakan sangat relevan dan urgensi dalam mendukung kinerja tenaga kependidikan tersebut diantaranya pemberian program pembiayaan untuk studi lanjutan bagi guru-guru yang belum sarjana, pengembangan professional guru berkelanjutan, melaksanakan sistem rekrutmen pengawas yang lebih ketat, dan memberikan program stimulus bagi kreativitas guru, pimpinan sekolah dan pengawas dengan program hibah penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Goestch, D.L dan Davis, S (2005) *Implementing Total Quality*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Joice, B, Weil Marsha dan Calhoun E. (2019) *Models of Teaching*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Langeveld, I. (2011). *The Good High School : Portrait of Character and Culture*. New York: Basic Book.
- Rivai, F dan Munir. (2009). *Education Management*. Jakarta : Rajawali Pests.
- Sagala, Saiful. (2007). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jakarta : Alfabeta.
- Sanjaya, Wina (2018). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta Kencana
- Sallis, Edward (2010). *Total Quality Management in Education*. London. Kogan Page Educational Management Series.
- Sergiovanni, T.I ct al (2010). *Education Crovernance and Administration*. Third Edition ,Massasuchests : Publishing Group.
- Slamet, E. Danim (2017). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- UMN Al-Washliyah (2018). *Laporan PPG Rayon 32 : Medan*. LPTK UMN-Alwashliyah.
- Usman, Husaini (2017) *Manajemen, teori, Pralaik dan Riset Pendidikan*. Edisi 3.Jakarta : Bumi Aksara.
- West dan Burnham, I (2007) *Managing Quality in Schools*. London: Prentice-Hall.
- Zamroni. (2007) . *Meningkatkan Mutu Sekolah* . Jakarta : PSAP Muhamadiyah